



SALINAN PUTUSAN

Nomor 674/Pdt.G/2019/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 18 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Staf Tata Usaha di ULM Banjarbaru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Banjarbaru sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bentok Kampung, 17 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon.

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 674/Pdt.G/2019/PA.Plh, tanggal 03 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0017/017/II/2019 tanggal 14 Januari 2019).



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 4 (empat) bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa adapun alasan Pemohon ingin berpisah dengan Termohon disebabkan dari awal setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon saling mementingkan ego masing-masing, dan juga pernikahan di antara keduanya terjadi atas dasar perjodohan, sehingga keduanya belum mengenal sifat satu sama lain, oleh sebab itu pada bulan April 2019, Pemohon merasa tidak sanggup lagi hidup dengan Termohon dan memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa diusir oleh Termohon.
5. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut keluarga Pemohon dan Termohon sudah ada mengupayakan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil/ gagal.
6. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya.
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.



Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon supaya tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut supaya hadir dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah.

Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2019 surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan yang ternyata maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa dalam pembuktian, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surat
 - 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0555/006/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.1.
 - 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: XXX, tanggal 19 Februari 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.2.
2. Saksi
 - 2.1. **SAKSI I** umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Utara.



Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon dari awal setelah menikah kemudian pisah.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon adalah keluarga yang harmonis, namun belum di karuniai anak.
- Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut yang penyebabnya pernikahan Pemohon dan Termohon karena dijodohkan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan dan tidak pernah saling mengunjungi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati para pihak untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil.

2.2. **SAKSI II** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon dari awal setelah menikah kemudian pisah.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon adalah keluarga yang harmonis, namun belum di karuniai anak.
- Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut yang penyebabnya pernikahan Pemohon dan Termohon karena dijodohkan.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan dan tidak pernah saling mengunjungi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati para pihak untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon mencukupkan pada bukti-bukitinya tersebut dan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun lagi kecuali hanya mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0017/017/II/2019 tanggal 14 Januari 2019) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kewenangan absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.



Menimbang, bahwa karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan atau mewakilkan pada kuasanya dan pula ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya agar di beri ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan sebagaimana telah disebutkan dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan.

Menimbang Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka bukti surat P.1, P.2, tersebut, telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti surat Pemohon yang berupa P.1, P.2, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum,



pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti surat P.1, P.2, tersebut, telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti Pemohon P.1, P.2, telah memenuhi syarat formil akta otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti P.1, P.2, telah sesuai menurut pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti P.1 dan P.2, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang bernama Dwi Noor hadijah binti Samsuri Zuli dan Muhammad Ahdiyat bin Ahmad Fajeri. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon adalah penduduk di Jalan Lestari Komplek Citra Persada Asri RT. 017 RW. 003 No. 007 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat di dalam pernikahan yang sah berdasarkan Hukum Islam harus dinyatakan terbukti.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon dan Termohon selama pernikahan belum dikaruniai anak, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut penyebabnya Termohon sering berkata-kata kasar pada Pemohon, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan sejak perkara di daftarkan dan tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang tidak di pertimbangkan dinyatakan di kesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk di Kota Banjarbaru.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat di dalam pernikahan yang sah berdasarkan Hukum Islam.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon semula adalah keluarga yang hidup harmonis namun belum dikaruniai anak
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dalam bentuk cekcok mulut yang penyebabnya pernikahan Pemohon dan Termohon di jodohkan.
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan sejak perkara di daftarkan dan tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, maka apabila perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan *madharat* bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, hal tersebut sesuai dengan kaidah syar'iyah yang berbunyi:



الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : “Kemadlaratan itu harus dihindarkan sedapat mungkin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar’i sebagai berikut:

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَانْزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنْ أَسْمِعَ عَالِمٌ

Artinya: Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik pula.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih dari Kitab Al-Iqna hal. 401, sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : “Talak itu adalah hak laki-laki (suami) sedang iddah adalah hak perempuan (isteri)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba’da al-dukhu*), dan berdasarkan catatan dari buku nikah Pemohon belum pernah bercerai maka sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj’i.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, apabila Pemohon dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara resmi atau patut maka gugurlah kekuatan putusan tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 606000,00 (enam ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ma'mun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd



Dititik Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Hj. Siti Maryam, S.H.
Hakim Anggota,

Ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Ma'mun

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp490.000,00
4. PNBP	Rp.20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp606.000,00

(enam ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadailan Agama Pelaihari
Panitera,

H. Gazali,S.H.